KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KemenkeuTepercaya

Kebijakan keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi

Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan R.I.

Magelang, 23 Februari 2025

Kerangka presentasi

1. APBN dan perekonomian
2. Kebijakan fiskal untuk kesejahteraan rakyat
3. Pembiayaan inovatif untuk akselerasi Pembangunan
4. Arahan Presiden dan tindak lanjut APBN 2025

APBN dan Perekonomian

INDONESIA LAHIR: CITA-CITA MULIA LINTAS GENERASI

- **melindungi segenap bangsa** Indonesia dan **seluruh tumpah darah** Indonesia dan
- untuk **memajukan kesejahteraan umum**,
- **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan
- ikut **melaksanakan ketertiban dunia** yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

"**Negara Republik Indonesia ini** bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, tapi **milik kita semua dari Sabang sampai Merauke**!"

"Cita-cita kita adalah melihat **wong cilik bisa tersenyum dan hidup sejahtera**."

"Mari kita hentikan dendam dan kebencian. Bangun kerukunan dan gotong-royong, inilah kepribadian bangsa Indonesia."

(Pidato Presiden, 20 Oktober 2024)

UNTUK MENCAPAI VISI INDONESIA EMAS 2045
BUTUH AKSELERASI PERTUMBUHAN 6-8 PERSEN PER TAHUN
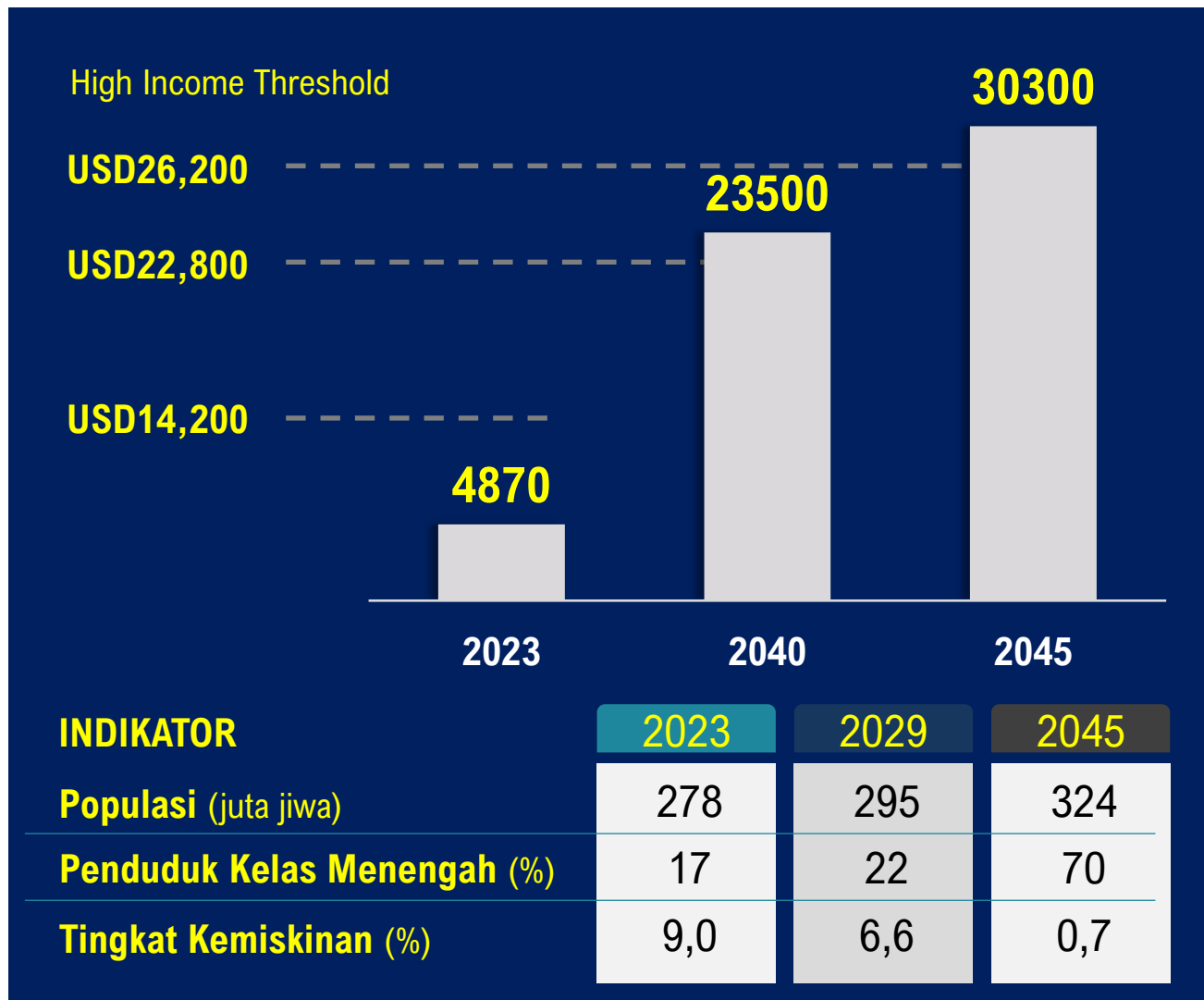
High Income Threshold

	2023	2040	2045
GNI per capita	4870	23500	30300
High Income Threshold	USD14,200	USD22,800	USD26,200

INDIKATOR	2023	2029	2045
Populasi (juta jiwa)	278	295	324
Penduduk Kelas Menengah (%)	17	22	70
Tingkat Kemiskinan (%)	9,0	6,6	0,7

PEREKONOMIAN & PERTUMBUHAN EKONOMI

Produk Domestik Bruto (PDB) - **Pendekatan Pengeluaran:** 100%

Konsumsi RT (C) 54%	+	Investasi (I) 30%	+	**Belanja Pemerintah (G)** 11%	+	Ekspor Bersih (X-M) 5%
Konsumsi semua rumah tangga, termasuk yang berasal dari subsidi langsung, bansos dll.		Total investasi untuk produksi jangka panjang, oleh RT, Badan Usaha dan Pemerintah, tmsk infrastruktur		Total pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyediakan jasa-jasa pelayanan dan fungsi pemerintahan		Total ekspor dikurangi total impor.

APBN dan APBD sebagai Instrumen

Pentingnya Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi tumbuh berarti semakin banyak produksi, semakin banyak tercipta lapangan pekerjaan, dan kemiskinan menurun

pendapatan per kapita meningkat

kesejahteraan meningkat

Ilustrasi: 2024 tumbuh 5,03% artinya kemampuan produksi/konsumsi riil (tanpa perubahan harga) naik 5,03%
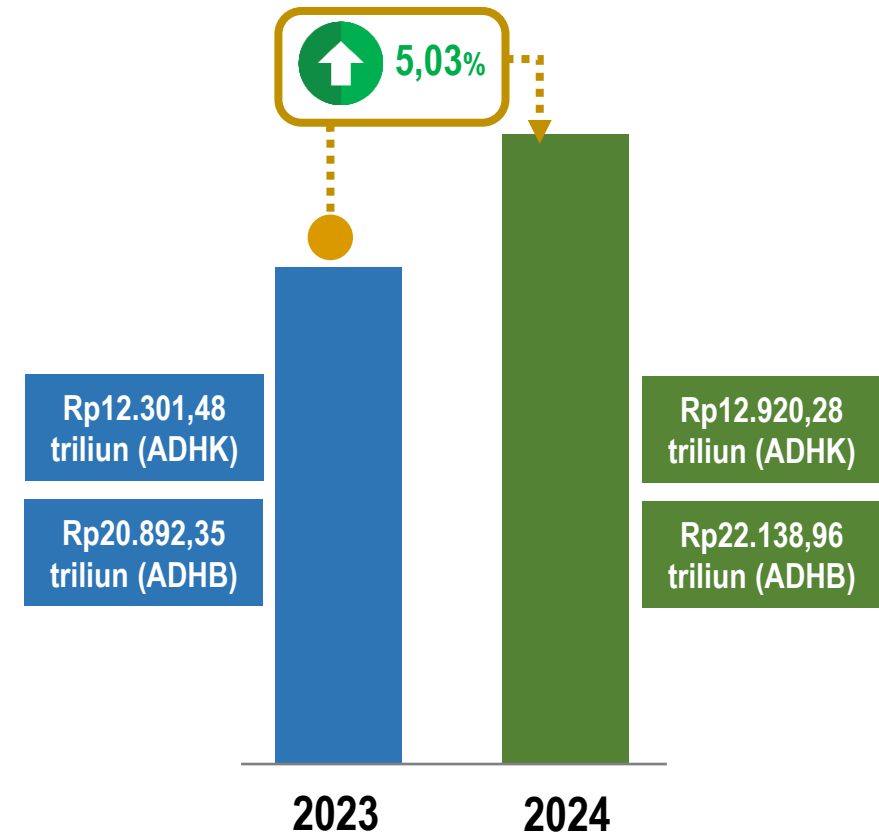
DISTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN PDB 2024:

MENURUT LAPANGAN USAHA

Distribusi (%)	Lapangan Usaha	Pertumbuhan (%)
18,98	Industri Pengolahan	4,43
13,07	Perdagangan	4,86
12,61	Pertanian	0,67
10,09	Konstruksi	7,02
9,15	Pertambangan	4,90
6,13	Transportasi & Pergudangan	8,69
4,34	Infokom	7,57
4,17	Jasa Keuangan	4,74
3,04	Adm. Pemerintahan	6,40
2,81	Jasa Pendidikan	3,75
2,64	Akomodasi & Makan Minum	8,56
2,35	Real Estat	2,50
2,05	Jasa Lainnya	9,80
1,92	Jasa Perusahaan	8,38
1,26	Jasa Kesehatan	8,11
1,03	Pengadaan Listrik & Gas	4,77
0,06	Pengadaan Air	1,56

Lima lapangan usaha dengan kontribusi terbesar, yakni **Industri Pengolahan**, **Perdagangan**, **Pertanian**, **Konstruksi**, dan **Pertambangan**.

Lapangan usaha dengan **pertumbuhan tinggi** meliputi:

- ✔ **Jasa Lainnya** ditopang oleh **aktivitas rekreasi** peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, **serta berbagai *event* olahraga dan hiburan.**
- ✔ **Transportasi & Pergudangan** didorong oleh peningkatan **jumlah penumpang dan barang karena mobilitas masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi lainnya.**
- ✔ **Akomodasi & Makan Minum** didukung oleh mobilitas masyarakat, serta aktivitas pemerintah dan swasta.

Sumber: Rilis Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (5 Februari 2025)

PASCA 2020 TUMBUH POSITIF DI SEMUA WILAYAH

Sumatra

2020	2021	2022	2023	2024
-1,20	3,18	4,69	4,69	4,45

- Industri Pengolahan
- Perdagangan
- Konstruksi

Kalimantan

2020	2021	2022	2023	2024
-2,30	3,24	4,94	5,43	5,52

- Pertambangan
- Konstruksi
- Perdagangan

Sulawesi

2020	2021	2022	2023	2024
0,23	5,67	7,07	6,37	6,18

- Industri Pengolahan
- Pertanian
- Perdagangan

22,12%

8,24%

7,12%

2,69%

57,02%

2,81%

Keterangan

Distribusi PDB ADHB 2024

Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (%)

Jawa

2020	2021	2022	2023	2024
-2,52	3,66	5,31	4,96	4,92

- Industri Pengolahan
- Perdagangan
- Konstruksi

Bali & Nusra

2020	2021	2022	2023	2024
-5,02	0,08	5,09	3,98	5,04

- Akomodasi & Makan Minum
- Pertambangan
- Perdagangan

Maluku & Papua

2020	2021	2022	2023	2024
1,53	10,22	8,67	6,94	7,81

- Industri Pengolahan
- Pertambangan
- Perdagangan

Sumber: Rilis Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (5 Februari 2025)

PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS, MAMPU MENURUNKAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN

Penurunan tingkat pengangguran terbuka didorong oleh penciptaan lapangan kerja yang tinggi

Tingkat kemiskinan berhasil diturunkan didukung penguatan program perlinsos

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
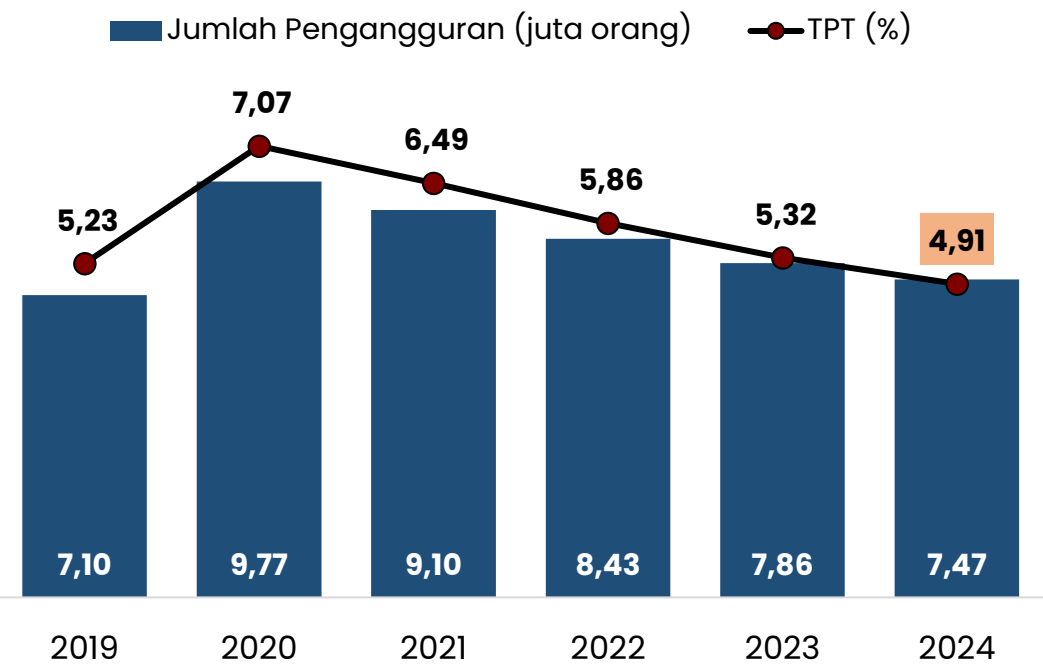
Sumber: BPS, data Agustus, diolah

Tingkat Kemiskinan (%)
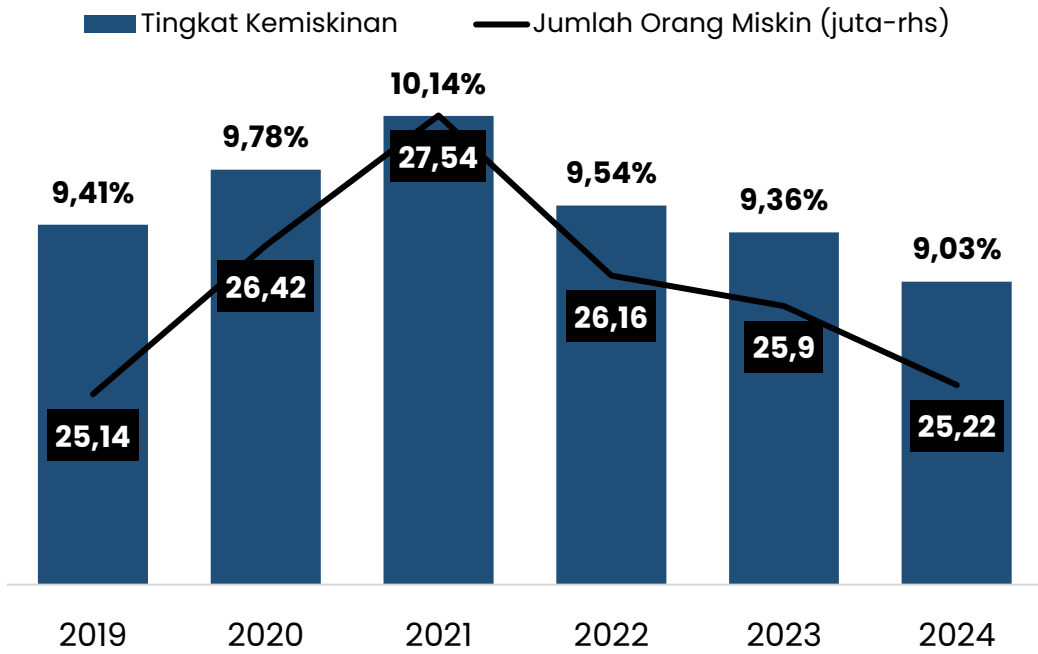
Catatan: Tingkat kemiskinan per September 2024 adalah sebesar 8,57%

Sumber: BPS, data Maret, diolah

INFLASI NASIONAL DALAM TREN MENURUN MENUNJUKKAN STABILITAS HARGA
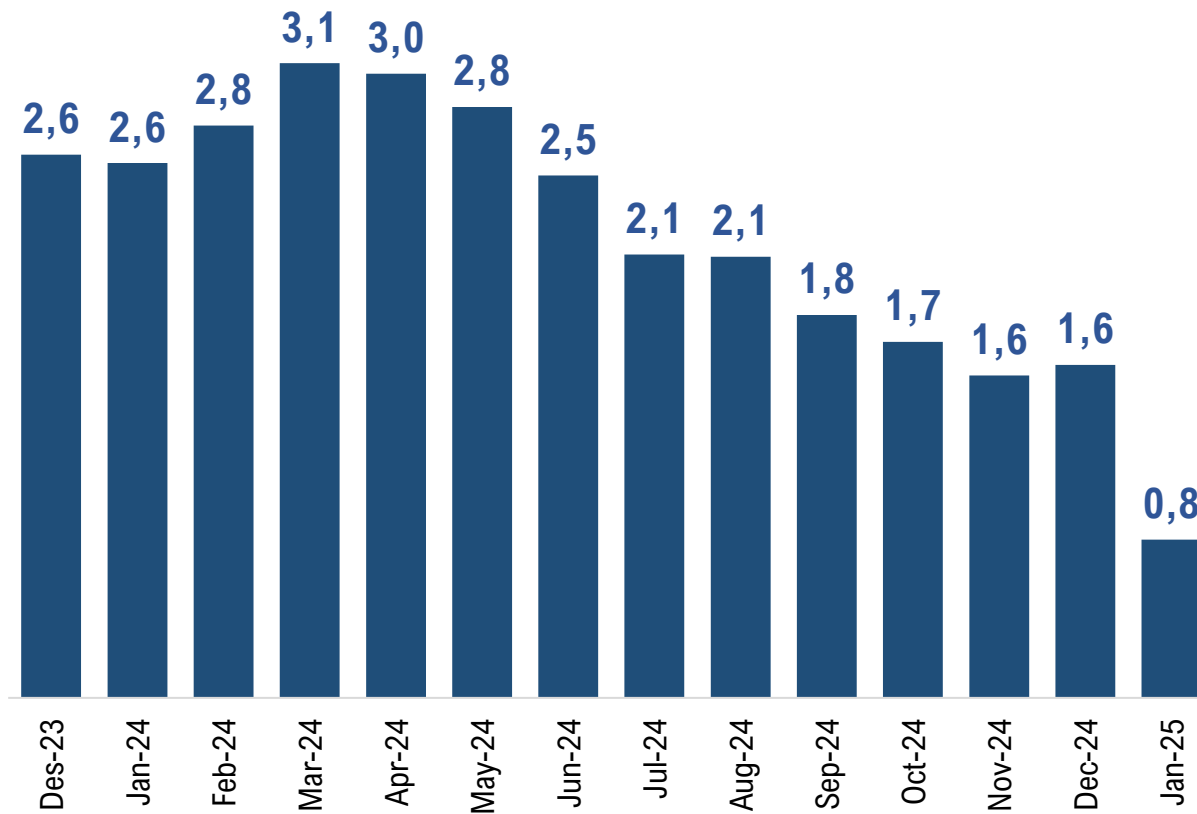
Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam pengendalian harga-harga barang dan jasa di daerah

PEMERINTAH DAERAH BERPERAN PENTING MENJAGA KESTABILAN HARGA DAN TINGKAT INFLASI
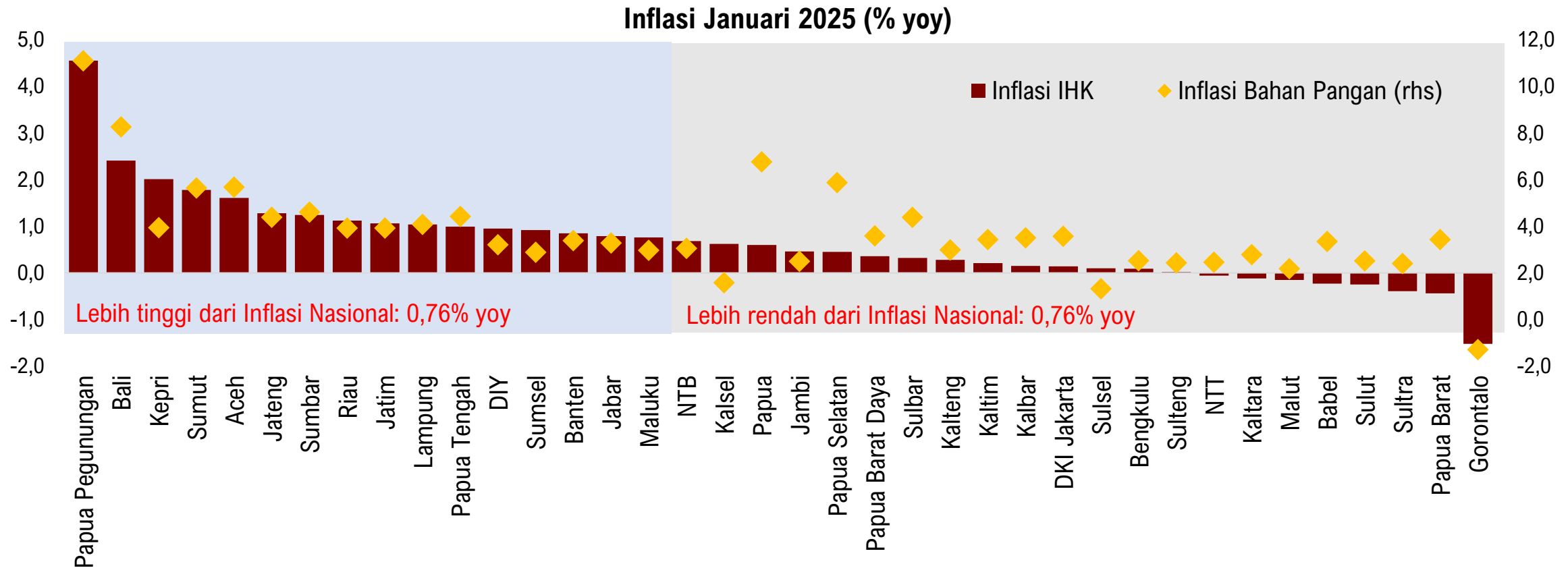
- Masih terdapat **tantangan** dalam pengendalian harga dan inflasi, a.l. keterbatasan infrastruktur dan suplai komoditas bahan pangan yang terbatas di beberapa wilayah
- **Koordinasi kebijakan secara pusat dan nasional** terus dilakukan untuk mengupayakan disparitas yang terus menurun.
- **Komitmen dan konsistensi Pemda** dalam menjaga stabilitas harga akan mendukung pengendalian inflasi.

Sumber: BPS, diolah

APBN DAN PEREKONOMIAN

APBN adalah instrumen untuk mencapai tujuan negara dan sekaligus alat untuk mengelola ekonomi

* Referensi: Fungsi APBN sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) UU Keuangan Negara beserta penjelasan
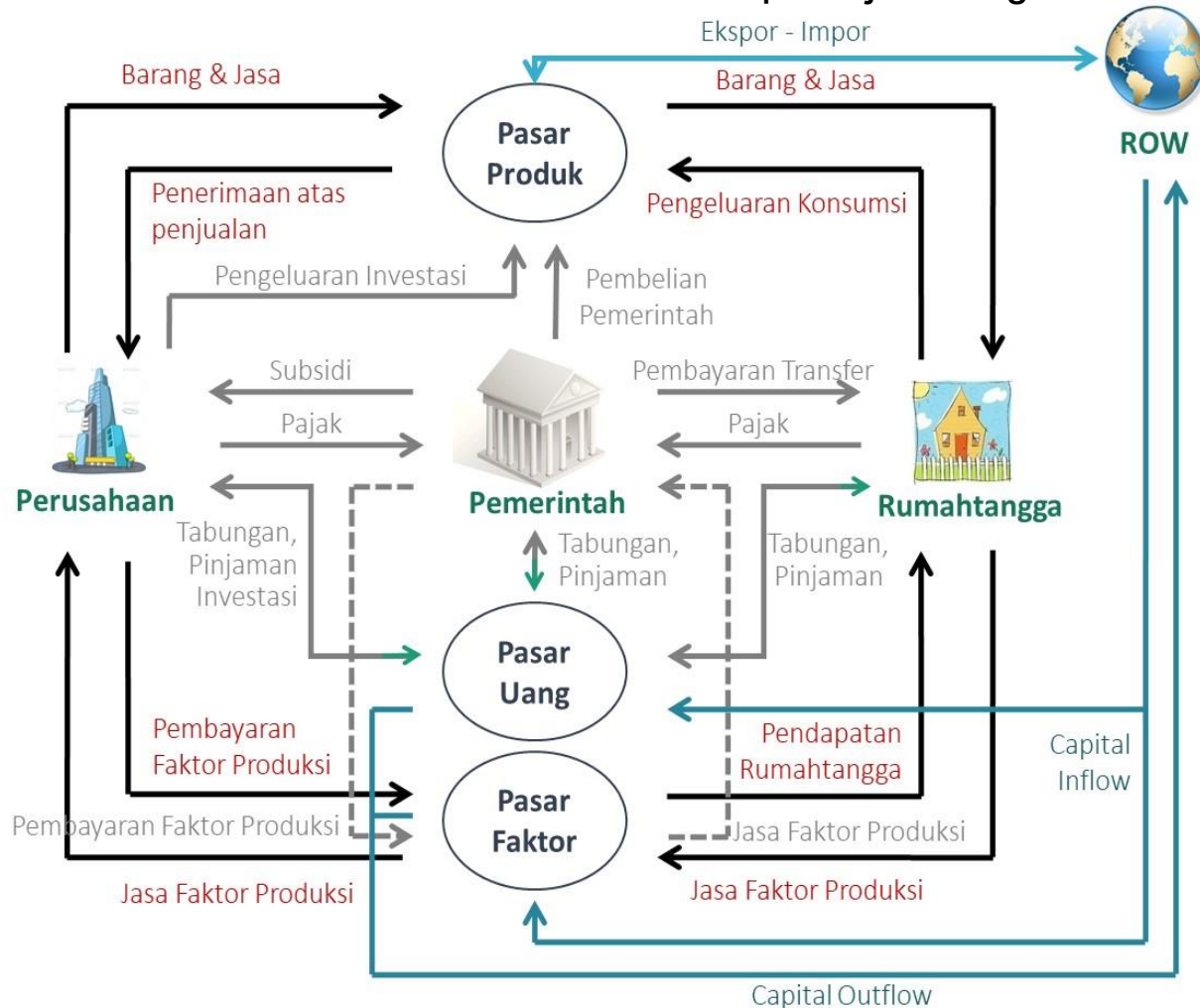
Fungsi APBN*

Alokasi menciptakan perekonomian yang efisien

- Pengelolaan *Market Failure* Perekonomian
- Penyediaan barang-barang publk (Infrastruktur, keamanan, peradilan)

Distribusi pemerataan antarakelompok rumah tangga dan antardaerah

- **Instrumen Pendapatan**: pajak progresif, pembebasan pajak barang pokok, pajak atas barang mewah
- **Instrumen Belanja**: Perlindungan sosial, Pendidikan, kesehatan dan perberdayaan masyarakat miskin

Stabilisasi menjaga perekonomian dari guncangan

- Merespons ketidakpastian global (*countercyclical*)
- Pengelolaan inflasi dan stabilitas harga.
- *Shock absorber* melindungi daya beli masyarakat berpendapatan rendah.

PENYUSUNAN APBN MEMPERTIMBANGKAN ASESMEN PERUBAHAN LINGKUNGAN GLOBAL, ASUMSI DASAR DAN TARGET PEMBANGUNAN

GLOBAL SETTING

HARGA KOMODITAS INTERNASIONAL

Memengaruhi penerimaan negara dan besaran subsidi

TRUMP 2.0

Memengaruhi ekspor dan impor dunia

SUKU BUNGA THE FED

Memengaruhi aliran modal investasi

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO & TARGET PEMBANGUNAN

Target PENDAPATAN

- **Pajak** (PPN, PPh, PPNBM, PBB)
- **Bea Cukai** (Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai)
- **Penerimaan Negara Bukan Pajak** (K/L, SDA)
- **Hibah**

Alokasi BELANJA

- **Pemerintah Pusat (K/L dan Non-K/L)**

Belanja K/L
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Bantuan Sosial

Belanja Non-K/L
Belanja Subsidi
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Hibah
Belanja Lain-lain
Pembayaran Bunga Utang

- **Transfer Ke Daerah**

PEMBIAYAAN

- **Pembiayaan Utang:** Surat berharga Negara, Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Pinjaman Luar Negeri (PLN)
- **Pembiayaan Investasi:** Penyertaan Modal Negara (BUMN dan BLU); Iuran Lembaga Internasional; Pembiayaan Pendidikan; Cadangan Pembiayaan Investasi; Investasi Lainnya

APBN 2025: Defisit 2,53% PDB

Dijaga Terkendali dalam Batas Aman

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Indikator	APBN 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)	5,2
Inflasi (%, yoy)	2,5
Suku Bunga SBN 10th (%, average)	7,0
Nilai Tukar (Rp/USD, average)	16.000
Minyak Mentah/ICP (USD/barrel, average)	82
Lifting Minyak Mentah (ribu bph)	605
Lifting Gas Bumi (ribu bsmph)	1.005

Uraian (triliun rupiah)	2024 APBN	2025 APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	**2.802,3**	**3.005,1**
I. Penerimaan Perpajakan	**2.309,9**	**2.490,9**
1. Penerimaan Pajak	1.988,9	2.189,3
2. Pendapatan Kepabeanan dan Cukai	321,0	301,6
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	**492,0**	**513,6**
III. Penerimaan Hibah	**0,4**	**0,6**
B. BELANJA NEGARA	**3.325,1**	**3.621,3**
I. Belanja Pemerintah Pusat	**2.467,5**	**2.701,4**
1. Belanja K/L	1.090,8	1.160,1
2. Belanja non-K/L	1.376,7	1.541,4
II. Transfer Ke Daerah	**857,6**	**919,9**
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(25,5)**	**(63,3)**
D. DEFISIT ANGGARAN (A - B)	**(522,8)**	**(616,2)**
% Defisit terhadap PDB	***(2,29)***	***(2,53)***
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**522,8**	**616,2**

TRANSFER KE DAERAH SEBAGAI INSTRUMEN UTAMA DESFIS

untuk mendorong **belanja daerah yang efektif & efisien** untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

	URAIAN	ALOKASI 2025
1.	Dana Bagi Hasil	192,3
2.	Dana Alokasi Umum	446,6
	- DAU tidak ditentukan penggunaannya	358,6
	- DAU ditentukan penggunaannya :	88,0
	▪ Penggajian Formasi PPPK	17,3
	▪ Pendanaan Kelurahan	1,7
	▪ Pendanaan Layanan Publik	69,0
3.	Dana Alokasi Khusus	185,2
	a. Dana Alokasi Khusus Fisik	36,9
	b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	146,7
	c. Hibah ke Daerah	1,6
4.	Dana Otonomi Khusus	17,5
5.	Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1,2
6.	Dana Desa	71
7.	Insentif Fiskal	6,0
	TOTAL TKD	**Rp919,9 T**

Kebijakan TKD, antara lain:

Sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah

Mendorong pemerataan, dan kesejahteraan

Perbaikan kualitas belanja APBD

Penguatan *local taxing power*

Pengembangan pembiayaan inovatif

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Sinergi APBN dan APBD untuk kesejahteraan rakyat
KAB. BENGKULU UTARA
KAB. GARUT
Rp10.015.718.000
KAB. BEKASI
Rp9.591.545.000
KAB. OGAN ILIR
KAB. MERANGIN
16

HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH (APBN DAN APBD) SINERGIS MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
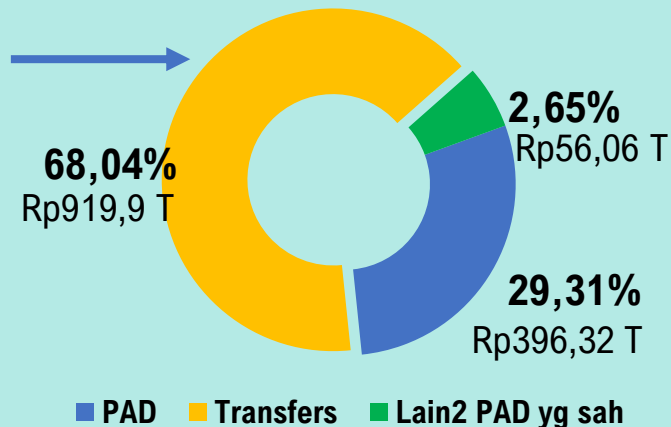
CONTOH PENDANAAN PUSAT-DAERAH
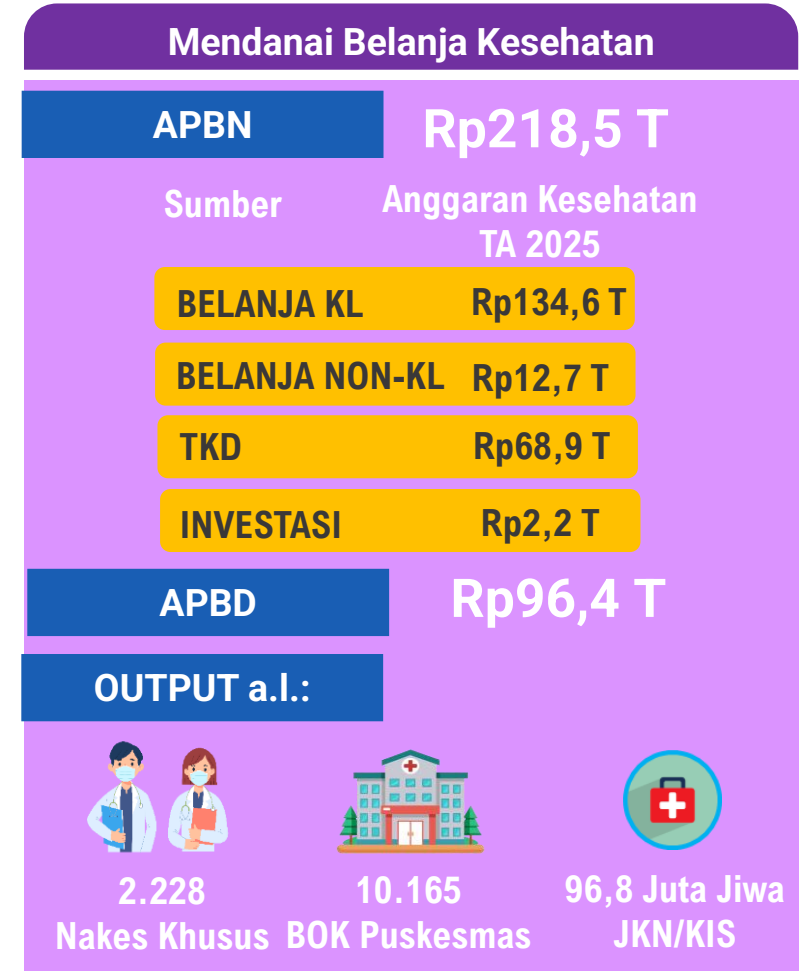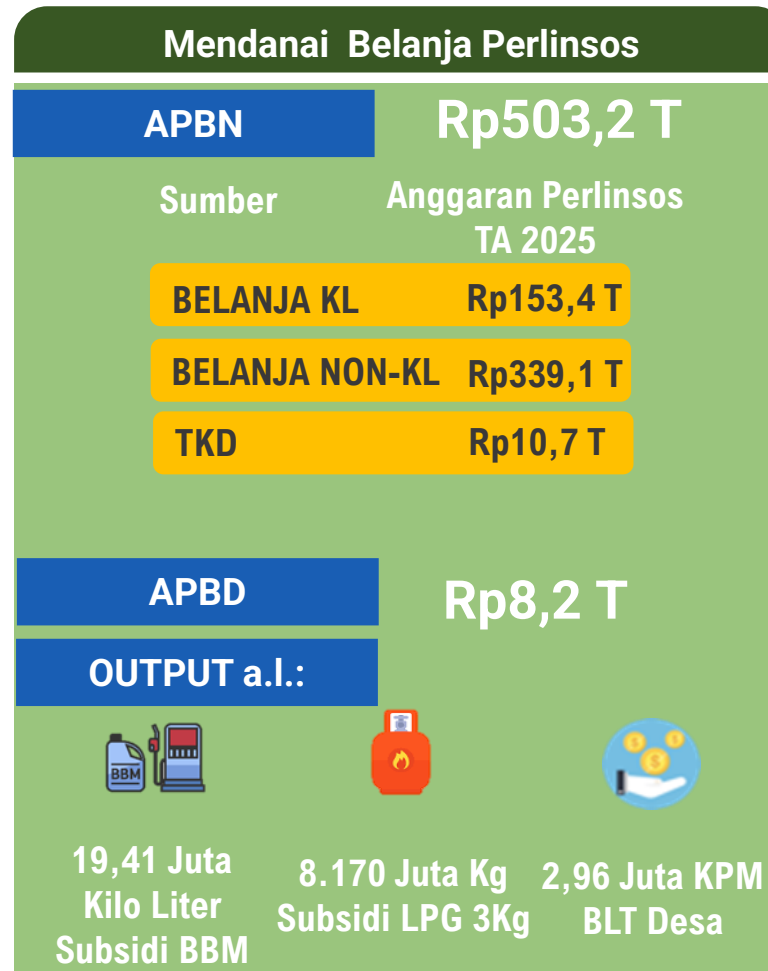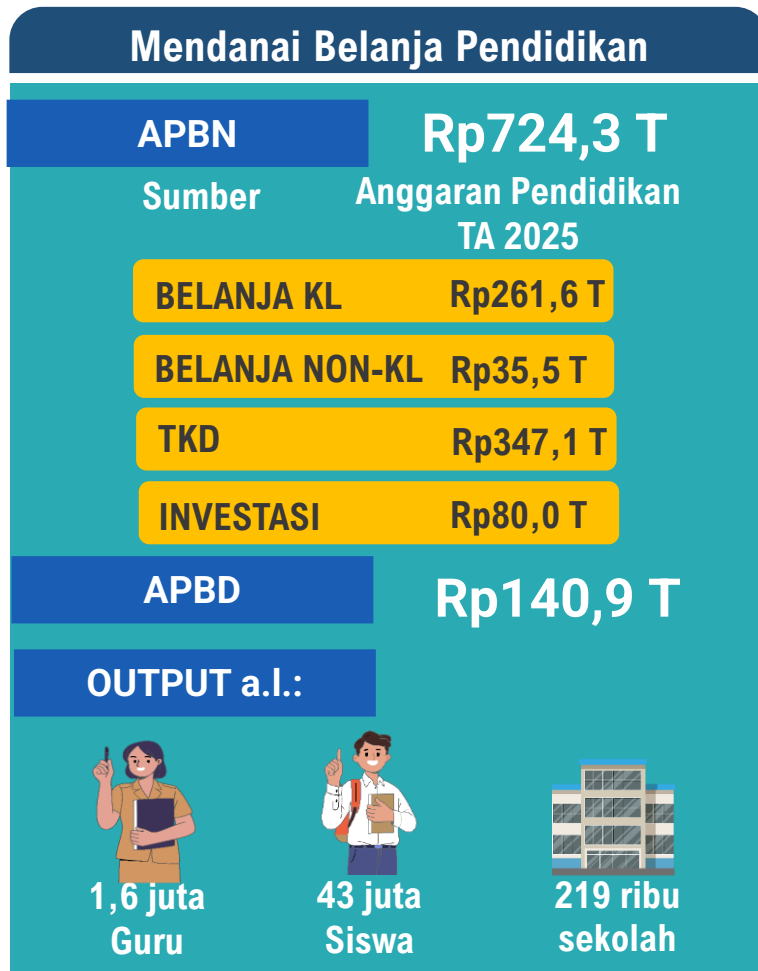
*APBN: Alokasi APBN TA 2025
**APBD: Anggaran Belanja per Fungsi TA 2025

PROGRAM UNGGULAN (*QUICK WIN*) PADA APBN TA 2025

Pusat dan Daerah perlu bersinergi dan berkontribusi dalam mensukseskan berbagai kebijakan/program nasional

Dukungan APBN TA 2025 : Rp121,0 T

Makan Bergizi Gratis
Rp71,0 T

Memberikan makan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan (a.l. prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan)

BADAN GIZI NASIONAL

Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Rp3,2 T

Cek kesehatan gratis yang mencakup 13 jenis skrining, a.l tensi, gula darah, kolesterol, hepar.

Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah
Rp1,8 T

Peningkatan RS type D menjadi type C di daerah beserta sarana prasana dan alat kesehatannya

Penuntasan TB melalui deteksi atau skrining
Rp8,0 T

KEMENTERIAN KESEHATAN

Renovasi Sekolah
Rp20 T

(Kemen PU Rp19,5 T; Kemenag Rp0,5 T)

Mencakup a.l. renovasi ruang kelas, meubelair, dan MCK

Sekolah Unggulan Terintegrasi
Rp2,0 T

(Kemendikti Saintek)

Pembangunan fisik sekolah unggulan di 4 lokasi

KEMEN PU, KEMENAG, KEMENDIKTISAINTEK

Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa
Rp15 T

- Intensifikasi 80.000 hektar
- ekstensifikasi (cetak sawah) 150.000 hektar

KEMENTERIAN PERTANIAN

MENJAGA KEBERLANJUTAN ANGGARAN PRIORITAS 2025
MENDUKUNG AGENDA PEMBANGUNAN : MAKAN BERGIZI GRATIS
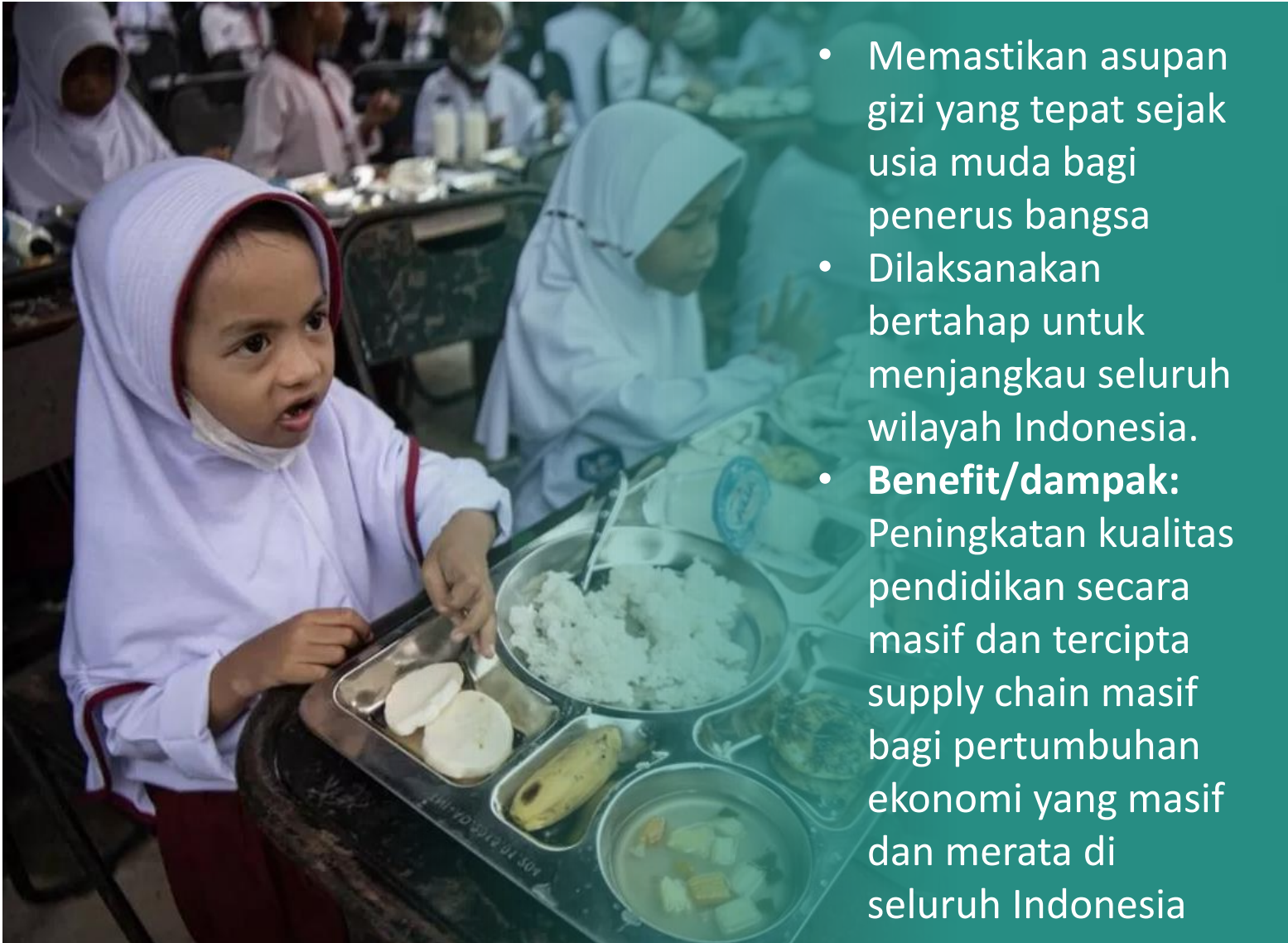
Program MBG Dilakukan Bertahap Sesuai Kesiapan Teknis Dengan Menjaga Tata Kelola Yang Akuntabel

TUJUAN PROGRAM MBG

Peningkatan Gizi & Partisipasi Sekolah

- Peningkatan akses dan pemenuhan makanan bergizi
- Penanaman perilaku pola gizi seimbang
- Peningkatan prestasi, partisipasi, dan kehadiran anak sekolah
- Pnegurangan angka putus sekolah

Pengurangan Kemiskinan

- Penciptaan lapangan kerja
- Pengurangan beban Rumah Tangga dalam perolehan pangan

Pemberdayaan Ekonomi Lokal

- Pemanfaatan bahan pangan local
- Peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, peternak, dan UMKM

UPAYA PERCEPATAN PERLUASAN MANFAAT MBG UNTUK SDM UNGGUL

	Kondisi *Existing*	Target Awal	Simulasi opsi Perluasan	
			Moderat	Optimis
Target Waktu	Jan 2025	Des 2025	Des 2025	2025
Jumlah SPPG	220	5000	15.000	30.000*
Cakupan SPPG	3.000 penerima	3.000-4.000 penerima	3.000 penerima	3.000 penerima
Target Penerima	589.902 siswa, ibu hamil dan balita	15,5jt siswa 2,4jt ibu hamil & balita	40jt siswa, ibu hamil & balita	82,9jt siswa, ibu hamil & balita
Anggaran (Rp)	71T	71T	71T + 100T	

PROYEKSI DAMPAK

- **Kontribusi terhadap PDB** 0,7%.
- **Tenaga kerja** yang terlibat: berkisar 1 juta orang
- **Pengurangan kemiskinan** 0,27 pp

*Agar 30.000 SPPG dapat operasional di 2026 perlu disiapkan sejak 2025 dengan optimalisasi tambahan anggaran di 2025

**Perkiraan jumlah populasi balita, siswa sekolah, dan ibu hamil – Susenas 2024
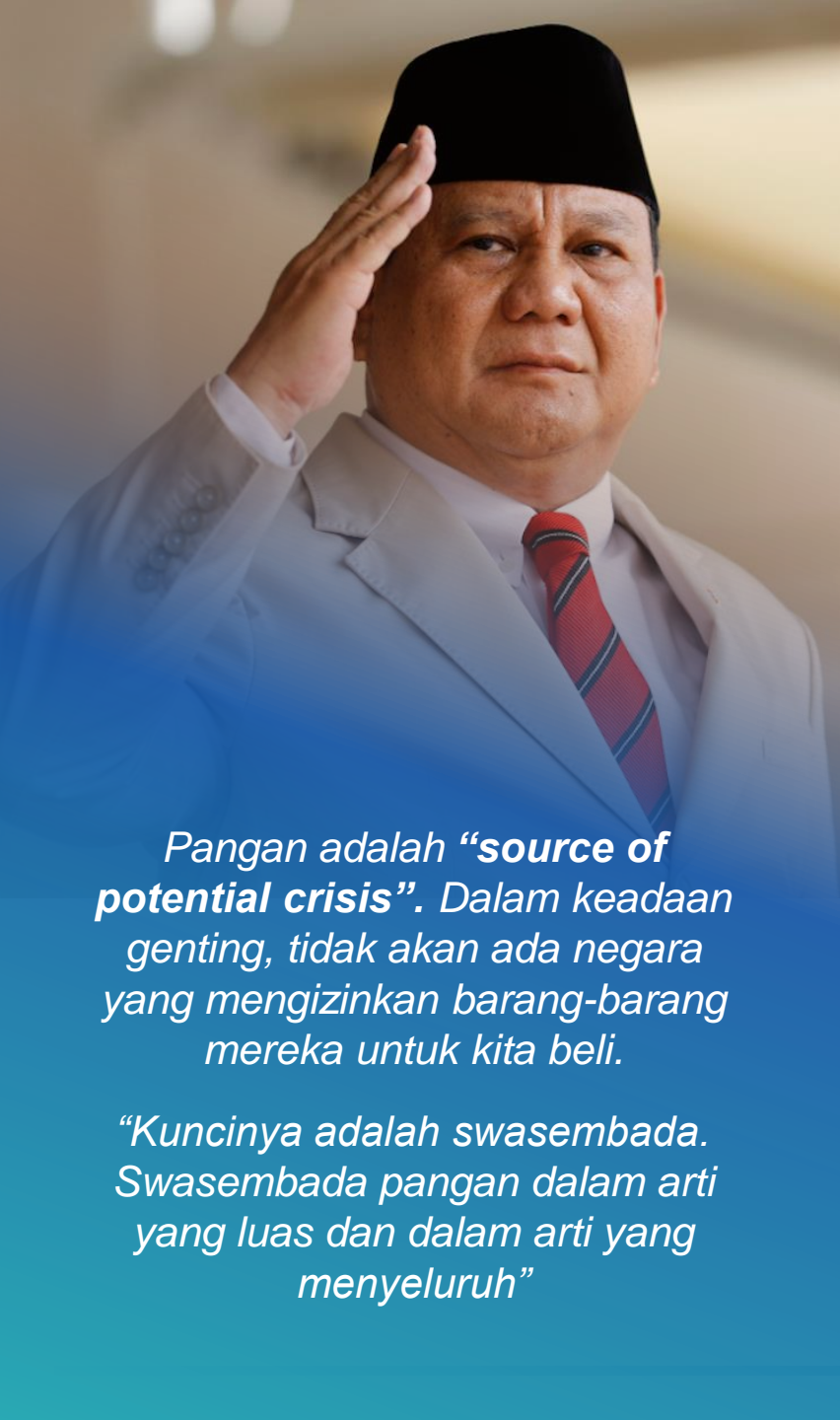
MENJAGA KEBERLANJUTAN ANGGARAN PRIORITAS 2025 UNTUK MENDUKUNG AGENDA PEMBANGUNAN : KETAHANAN PANGAN

*Pangan adalah **"source of potential crisis".** Dalam keadaan genting, tidak akan ada negara yang mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli.*

"Kuncinya adalah swasembada. Swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh"

- **Diversifikasi Pangan**
  Mendorong konsumsi sumber alternatif
- **Food Estate**
  Pengembangan lahan pertanian skala besar untuk meningkatkan produksi pangan strategis.
- **Dukungan Petani**
  Agar biaya produksi lebih rendah dan hasil pertanian lebih optimal.
- **Stabilisasi Harga**
  Mengelola cadangan bahan pangan lain guna mencegah lonjakan harga.

PASCA PANDEMI, PERTUMBUHAN PULIH CEPAT DI SELURUH WILAYAH, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN TERUS MENURUN
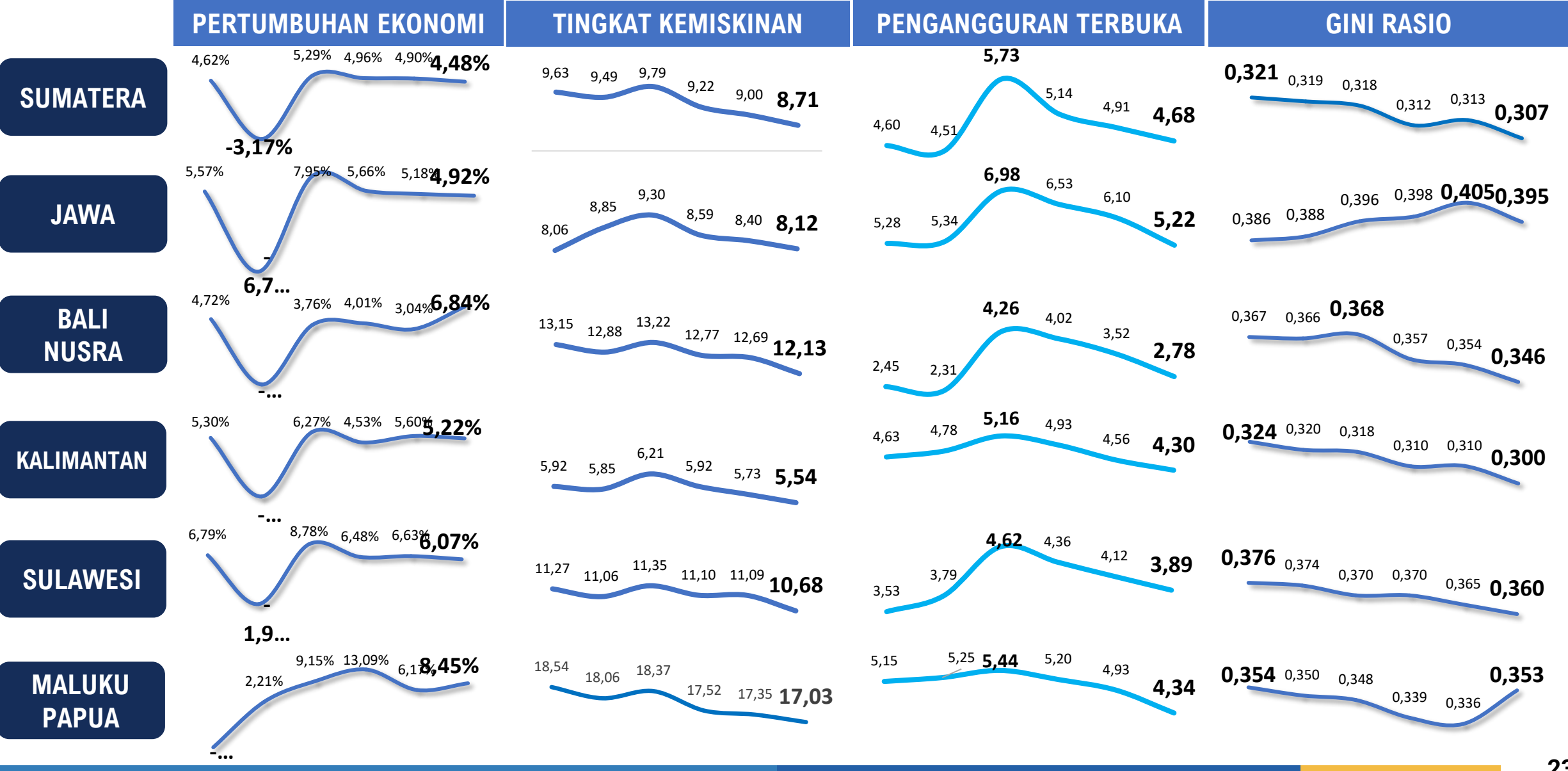
TRANSFER KE DAERAH EFEKTIF: ketimpangan antardaerah turun dan kemandirian desa meningkat
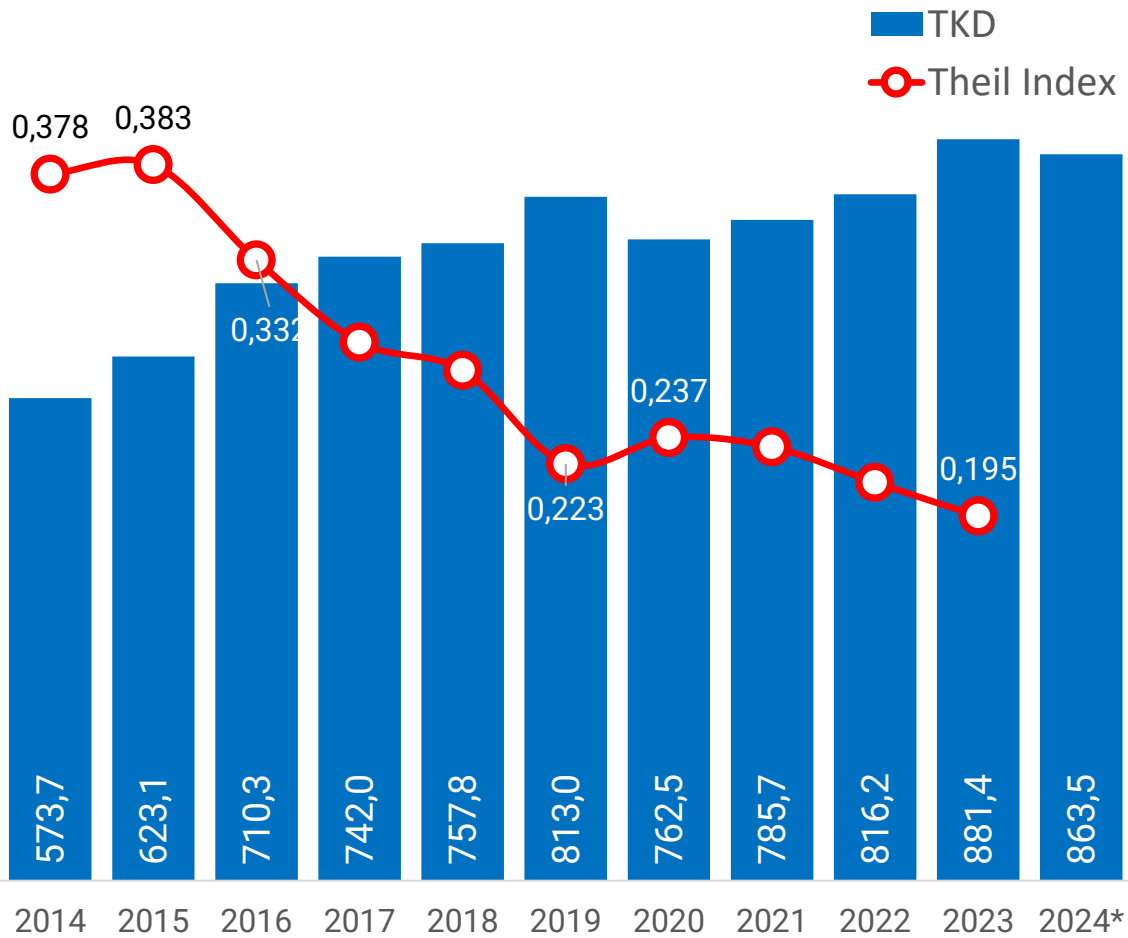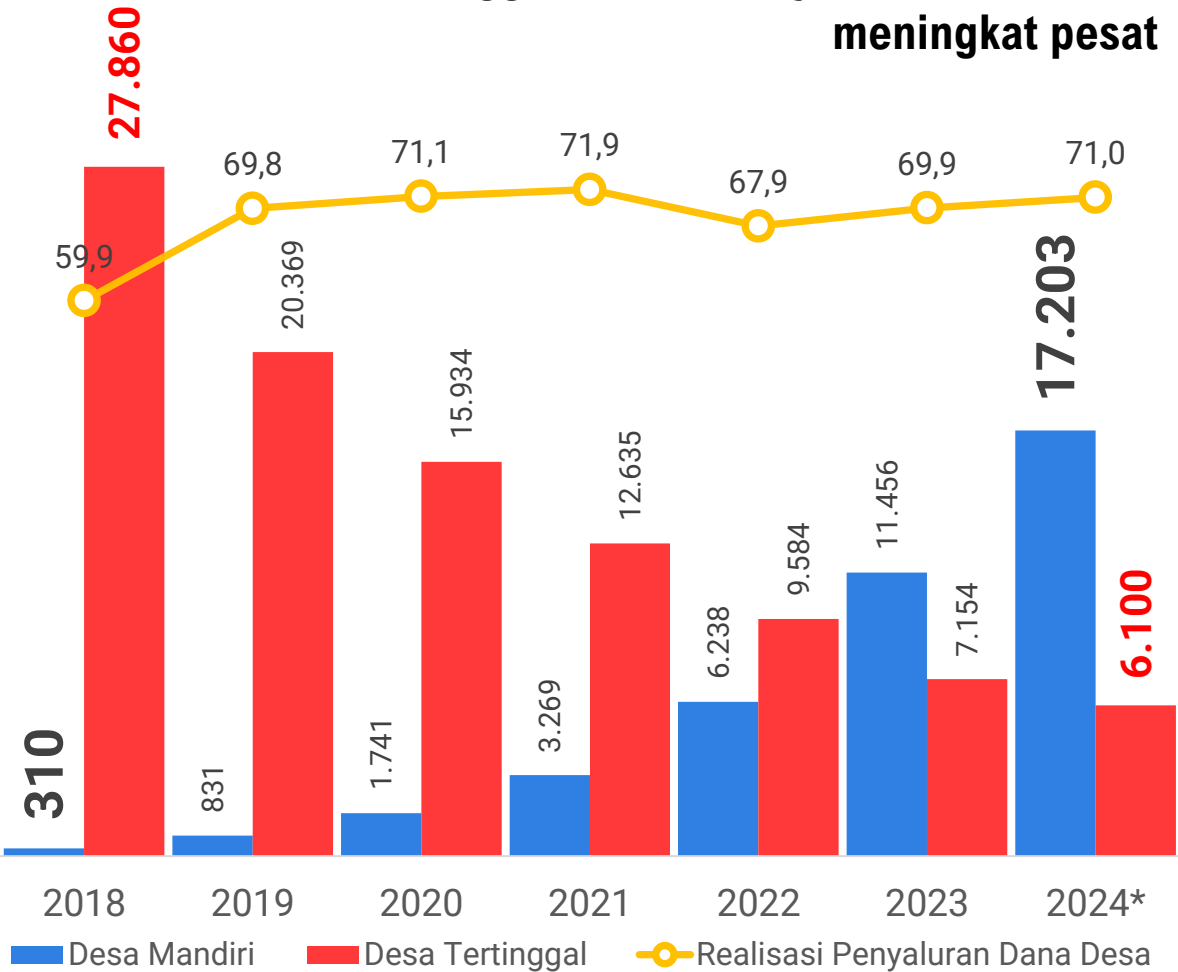
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KONFERENSI PERS | APBN 2024
Kerja Keras untuk
Skema pembiayaan inovatif untuk akselerasi pembangunan daerah
Suahasil Nazara
Sri Mulyani Indrawati

KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL TERUS DIARAHKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN & AKSELERASI PERTUMBUHAN

2023 - 2025

OPTIMALISASI PDRD

- Menurunkan ***administrative* dan *compliance cost*** melalui restrukturisasi jenis pajak dan rasionalisasi retribusi
- Memperluas **basis pungutan pajak** secara terukur & **penyesuaian tarif**
- Penguatan Sinergitas Nasional pemungutan PDRD
- Pelaksanaan Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB

COLLECTING MORE

2024 - 2025

TRANSFER BERBASIS KINERJA

- **DAU Yang Diarahkan Penggunaannya** untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- DBH mempertimbangkan **kinerja daerah** dalam mendorong penerimaan dan pemeliharaan lingkungan termasuk **menangani eksternalitas negatif**
- **Insentif bagi Daerah dan Desa berkinerja baik**
- **Penyaluran berbasis kinerja** untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik

HARMONISASI FISKAL

- Penyelarasan prioritas nasional dan daerah melalui Bab **KEMPPKF Regional** di dalam KEMPPKF
- Penyusunan Kerangka Manajemen **Risiko Fiskal Daerah** untuk mendorong pengelolaan fiskal nasional dan APBN yang lebih sehat

SPENDING BETTER

2025

PEMBIAYAAN DAERAH

- Mendorong **perluasan akses terhadap skema alternatif pembiayaan** (Obligasi, Sukuk Daerah)
- Penguatan **pembiayaan kreatif** (KPBU dan Dana Abadi Daerah)
- Memperkenalkan skema **Sinergi Pendanaan** untuk akselerasi pembangunan daerah.

INNOVATIVE FINANCING

SKEMA *INNOVATIVE FINANCING* YANG *PRUDENT* UNTUK AKSELERASI PEMBANGUNAN

PEMBIAYAAN UTANG DAERAH

UU HKPD
UU Nomor 1 Tahun 2022

Bentuk:

- Pinjaman Daerah
- Obligasi Daerah
- Sukuk Daerah

Sumber Pinjaman Daerah:

- Pemerintah Pusat
  - ✓ APBN/Rupiah murni
  - ✓ Penerusan pinjaman dalam negeri
  - ✓ Penerusan pinjaman luar negeri
- Daerah lain
- Lembaga Keuangan Bank (LKB)
- Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
- Masyarakat

SINERGI PENDANAAN

- Daerah menyusun Rencana Sinergi Pendanaan untuk **akselerasi penyediaan infrastruktur** dan **program prioritas lainnya.**
- Berasal dari **APBD** dan **Non APBD**
- Dukungan berupa **pendanaan dari APBN** dapat diberikan melalui belanja K/L atau Tugas Pembantuan

APBD
- PAD;
- TKD ; dan/atau
- Pembiayaan Utang

Non APBD
- BUMN/BUMD;
- **KPBU**; dan/atau
- Kerja Sama Daerah

Konsepsi Sinergi Pendanaan akan membuka **ruang pengembangan kerja sama antardaerah** dalam mengatasi masalah pembangunan lintas daerah yang semakin kompleks seperti area metropolitan.

KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA (KPDBU)

KPDBU adalah kerja sama dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum berdasarkan perjanjian kedua belah pihak dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko.

Transfer Risiko kepada Pihak Swasta

- Antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha
- Sebagai salah satu sumber *value for money* (VfM)
- Pembagian risiko berwujud pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak

Innovative financing dilaksanakan dengan **prinsip kehati-hatian (*prudent*)** dan **Komitmen Legislatif (DPRD)**

DUKUNGAN PEMERINTAH DALAM PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH MELALUI PINJAMAN DAERAH PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PT SMI)

Contoh Pinjaman Daerah PT SMI

SEKTOR INFRASTRUKTUR

Transportasi | Jalan | Pengairan | Perumahan Rakyat | Manajemen Persampahan | Sarpras Kesenian

Efisiensi Energi | Air Minum dan Irigasi | Air Limbah | Informatika | Sapras Olahraga | Energi Terbarukan, Konservasi Energi

INFRASTRUKTUR SOSIAL

Kesehatan | Lembaga Pemasyarakatan | Pendidikan | Pariwisata | Perkotaan | Kawasan Industri

Ke depannya, PT SMI sebagai *Development Finance Institution* akan mengembangkan **pembiayaan dengan *cross subsidy*—subsidi bunga rendah (*non commercial*)** hingga kustomisasi pembiayaan menggunakan ***clustering*** bagi Pemerintah Daerah

PINJAMAN DAERAH (REGULER) RSUD KONAWE

Kebutuhan

- ✓ Layanan unggulan untuk mendukung aktivitas industri mineral (SDA) di Kabupaten Konawe;
- ✓ Rujukan regional untuk Kabupaten Konawe dan daerah sekitarnya.

DAMPAK PINJAMAN DAERAH

Biaya Ekonomi
Rp2,68Triliun

Peningkatan *Output*
0,41%

Peningkatan Nilai Tambah
0,27%

Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga
0,33%

Peningkatan Lapangan Pekerjaan
0,08%
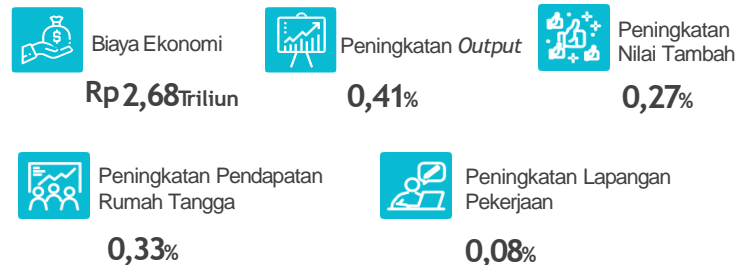
PINJAMAN DAERAH (PEN) KAB MOROWALI UTARA

Penanganan 18 ruas jalan dan 2 jembatan serta 25 infrastruktur kesehatan Tahun 2021.

Kebutuhan

- ✓ Mempermudah akses transportasi untuk distribusi barang dan jasa ke desa terpencil;
- ✓ Mengurangi Beban Logistik Terhadap Harga Angkutan.

DAMPAK PINJAMAN DAERAH

1. Peningkatan indeks desa membangun menjadi desa mandiri;
2. Penurunan Kemiskinan (dari 2020 : 14,10% menjadi **2022 : 12,97%)** dan Pertumbuhan Ekonomi (dari 2020 : -0,23% menjadi **2022 : 36,37%);** serta penurunan TPT (dari 2020 : 5,16% menjadi **2022 : 2,25%)**
3. Efisiensi waktu distribusi hasil produksi petani di desa terpencil.

DUKUNGAN PEMERINTAH DALAM PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH MELALUI KPDBU PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PT PII)

DUKUNGAN DALAM SKEMA KPDBU

PDF *(Project Development Facility)*	Fasilitas penyusunan kajian akhir prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi PJPK dalam transaksi proyek KPBU
VGF *(Viability Gap Fund)*	**Kontribusi sebagian biaya konstruksi** yang diberikan **secara tunai** pada proyek KPBU yang sudah memiliki kelayakan ekonomi (belum memiliki kelayakan finansial)
Bank-ability	Pendirian **SMV** untuk penyediaan penjaminan pemerintah (PT PII) dan pembiayaan jangka panjang (PT SMI maupun PT IIF).

Proyek KPBU TPPAS Legok Nangka

KPBU *Large Scale*

PJPK	Gubernur Jawa Barat
Lingkup	Membangun fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, perbaikan sanitasi dan kesehatan masyarakat, dukungan konsep *circular economy,* dan implementasi pengelolaan sampah yang *sustainable*.
Masa Konsesi	20 tahun, 3 tahun masa konstruksi
Spesifikasi Teknis	Mencakup desain dan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, serta pembiayaan Volume sampah: 1.853-2.131 tpd
Nilai Investasi	Total Capex: **Rp4 triliun** Total Opex: **Rp 100 miliar**

Key Success

- Proyek KPBU **pertama** untuk sektor pengelolaan persampahan
- **Komitmen** PJPK kuat dan **kapasitas** SDM mumpuni
- Penyiapan proyek dan transaksi oleh Lembaga Internasional
- Menerapkan ***creative financing*** (modalitas swasta; dukungan berupa VGF dan Penjaminan Pemerintah: hibah Lembaga internasional; serta dukungan APBD berupa lahan dan *tipping fee*)

Proyek KPDBU APJ Kabupaten Madiun
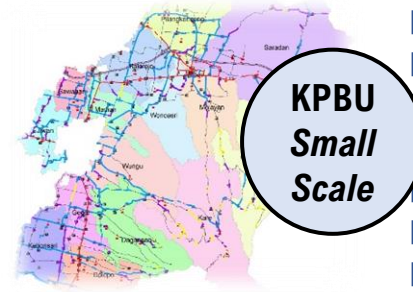
KPBU *Small Scale*

PJPK	Bupati Madiun
Lingkup	Pembangunan dan pengoperasian APJ, pemasangan meterisasi, penyediaan layanan dan teknologi LED
Masa Konsesi	10 tahun operasi dan 9 bulan konstruksi
Spesifikasi Teknis	Jumlah lampu 7.459 titik, termasuk instalasi sistem meterisasi, kabel udara, dan panel box
Nilai Investasi	Total Capex: **Rp100 miliar** Total Opex: **Rp13,5 miliar**

Key Success

- Proyek KPDBU **pertama** untuk sektor konservasi energi (penerangan jalan)
- **Komitmen** PJPK kuat dan **kapasitas** SDM mumpuni
- Dukungan dari **DPRD**
- **Penyiapan proyek dan transaksi oleh Pemkab Madiun** (Tanpa Fasilitasi PDF)
- **Komitmen APBD** untuk pembayaran *Availability Payment* Daerah

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Arahan Presiden dan
tindak lanjut APBN 2025

PENCADANGAN TRANSFER KE DAERAH & EFISIENSI APBD (INPRES 1/2025)

Indonesia harus siap menghadapi dinamika dan ketidakpastian global

Anggaran harus digunakan secara hemat, sehingga dapat digunakan untuk belanja prioritas

Arahan Presiden: Efisiensi Belanja Tidak Produktif

BELANJA K/L	TKD
256,1T (22,1% dari pagu awal)	50,6T (5,5% dari pagu awal)

KB DBH	13,9T	Alokasi TKD yang belum dirinci per daerah/desa penerima. Tidak menganggu APBD dan APBDes yang telah ditetapkan
Insentif Dana Desa	2T	
DAU SG PU	15,6T	TKD *earmarked* infrastruktur (fokus efisiensi presiden)
DAK Fisik	18,3T	
Dana Otsus	0,5T	TKD asimetris (tambahan dari alokasi TKD bagi daerah tertentu).
Dais	0,2T	

EFISIENSI APBD DAN PENCADANGAN TKD UNTUK PRIORITAS NASIONAL

- Pencadangan TKD jika dibandingkan dengan Indeks komposit Perekonomian menunjukkan **korelasi positif dan searah**
- Pemda juga diinstruksikan untuk melakukan **efisiensi belanja APBD yang tidak produktif (perjadin, belanja penunjang, honorarium, kegiatan seremonial)**
- Efisiensi APBD menjadi momentum bagi Pemda untuk **memperbaiki kualitas belanja** yang lebih produktif, tepat sasaran dan efisien
- Efisiensi APBD akan **menjadi tambahan *fiscal space*** yang dapat digunakan untuk menutup kebutuhan akibat pencadangan TKD, sekaligus dapat dimanfaatkan Kepala Daerah baru untuk mendanai program visi misinya

Poin Penting Pencadangan TKD

- Tidak menganggu operasional dan penyediaan layanan dasar --> dikenakan hanya ke TKD *earmarked* dan yang belum dirinci per daerah.
- Tidak mengurangi manfaat yang diterima langsung masyarakat --> digunakan untuk **program MBG**, **ketahanan pangan dan energi**

KEMENKEU HADIR DI DAERAH SEBAGAI *REGIONAL CHIEF ECONOMIST (RCE)*

Dalam rangka sinergi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ***RCE menjadi mitra strategis bagi pemda untuk memberikan rekomendasi kebijakan kewilayahan dalam peningkatan perekonomian daerah***

Evaluasi kebijakan fiskal tingkat pusat dan daerah	**Perumusan kebijakan** berbasis data kedaerahan yang akurat	**Analisis penyaluran Transfer Ke Daerah** dan **evaluasi kapasitas daerah**	**Amplifikasi kebijakan Fiskal** di daerah	**Pemetaan kondisi ekonomi regional** termasuk **potensi daerah**

Stakeholders Strategis

- **UNIVERSITAS**
- **PEMERINTAH DAERAH**

Kemenkeu sebagai ***Regional Chief Economist*** **(RCE)**

Local Expert

- **Amplifikasi kebijakan pemerintah di daerah**
- ***Sharing knowledge*** **terkait kompetensi fiskal dan ekonomi**
- **Penyusunan kajian terkait fiskal dan ekonomi daerah**

OUTPUT RCE

- **Kajian Fiskal Regional (KFR)**
  Merupakan kajian komprehensif dari sisi kebijakan fiskal yang memiliki dampak terhadap perekonomian
- **Kajian Tematik Ekonomi dan Fiskal**
  Mengangkat isu-isu tematik terkait ekonomi dan fiskal di regional
- **Kajian Pengelolaan Kas Pusat dan Daerah**
  Analisis mengenai deviasi kas serta optimalisasi kas negara dan daerah

Kontribusi Kemenkeu dalam Berbagai Forum Strategis di Daerah

KEM PPKF & KUA-PPAS	TPID	TPAKD	TP2DD
Penilaian Keselarasan **KUA PPAS** dengan **KEM PPKF**	Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

RCE MERUPAKAN MITRA PEMDA UNTUK MEMBANGUN DAERAH

Analisis Peluang Investasi Daerah

Kuliah Umum Fiskal dan Ekonomi ke Universitas

Diseminasi Kajian RCE kepada Stakeholders

Redesign Kurikulum Akademis Fakultas Ekonomi pada Universitas

Kolaborasi Kemenkeu dan Pemda dalam Pemberdayaan UMKM

Forum Penilaian Keselarasan KUA PPAS dan KEM PPKF

PERAN KUNCI KEPALA DAERAH DALAM PEMBANGUNAN

TUGAS KEPALA DAERAH*

- memimpin Pemerintahan Daerah
- memelihara ketenteraman dan ketertiban
- menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD
- menyusun APBD, perubahan APBD, & pertanggungjawaban APBD
- mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan
- mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PERAN KEPALA DAERAH

1. Kepemimpinan yang efektif dan transformatif dalam pelaksanaan urusan pemerintahan
2. Reformasi keuangan daerah agar prudent, efektif, efisien, dan taat asas:

Efisiensi Belanja Daerah

1. Momentum reformasi dan *baseline* pengelolaan keuangan daerah
2. Belanja birokrasi dan administrasi dialihkan kepada belanja produktif
3. Hasil efisiensi sebagai tambahan *fiscal space* bagi Kepala Daerah dalam mewujudkan visi misi

Optimalisasi Pendapatan Daerah

1. Pajak & Retribusi (termasuk pemanfaatan aset) dengan tetap menjaga perekonomian dan akses layanan publik
2. Sumber non pungutan, a.l. optimalisasi BUMD, BLUD, atau kerja sama dengan badan usaha

Mendorong pemanfaatan pembiayaan daerah secara *prudent*

a.l. pinjaman daerah, sukuk daerah, obligasi daerah, dan KPBU

3. Menjaga kondusivitas daerah sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan
4. Inovasi, kolaborasi, dan sinergi untuk menjawab tantangan nyata di daerah

****sesuai Pasal 65 UU Pemda***

Terima kasih

Kementerian Keuangan R.I.
Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1
Jakarta Pusat 10710
Indonesia
www.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN

SINERGI PUSAT & DAERAH: PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA YANG TINGGI UNTUK AKSELERASI PENURUNAN PENGANGGURAN

Jumlah Pengangguran menurut Provinsi per Agustus 2024 (orang)

SUMATERA

ACEH	152.929
SUMUT	457.794
SUMBAR	178.278
RIAU	121.361
JAMBI	86.075
SUMSEL	179.709
BENGKULU	35.339
LAMPUNG	209.161
KEP. BABEL	37.214
KEP. RIAU	71.572

KALIMANTAN

KALBAR	146.201
KALTENG	58.631
KALSEL	93.256
KALTIM	107.022
KALTARA	15.343

SULAWESI

SULUT	81.180
SULTENG	48.434
SULSEL	204.760
SULTRA	45.572
GORONTALO	20.404
SULBAR	20.876

MALUKU & PAPUA

MALUKU	59.100
MALUT	27.747
PABAR	12.511
PBD	20.627
PAPUA	31.773
PASEL	9.554
PAPTENG	22.047
PAPEG	13.485

JAWA

DK JAKARTA	337.992
JABAR	1.768.226
JATENG	1.047.451
DIY	78.667
JATIM	1.020.651
BANTEN	414.754

BALI & NUSA TENGGARA

BALI	48.676
NTB	87.011
NTT	94.216

NASIONAL

Sumber: BPS, diolah
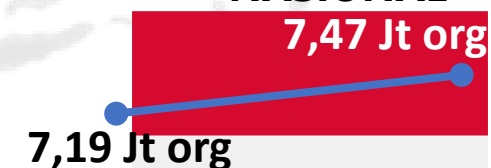
SINERGI PUSAT & DAERAH: PENGUATAN PROGRAM PERLINSOS SEBAGAI KATALIS PENURUNAN KEMISKINAN

Jumlah Penduduk Miskin Per Provinsi per September 2024 (dalam ribu jiwa)

SUMATERA

ACEH	719
SUMUT	1.111
SUMBAR	315
RIAU	473
JAMBI	273
SUMSEL	949
BENGKULU	261
LAMPUNG	939
KEP. BABEL	79
KEP. RIAU	125

KALIMANTAN

KALBAR	334
KALTENG	149
KALSEL	180
KALTIM	212
KALTARA	41

JAWA

DK JAKARTA	449
JABAR	3.668
JATENG	3.396
DIY	430
JATIM	3.894
BANTEN	777

SULAWESI

SULUT	173
SULTENG	358
SULSEL	712
SULTRA	305
GORONTALO	170
SULBAR	156

BALI & NUSA TENGGARA

BALI	176
NTB	659
NTT	1.108

MALUKU & PAPUA

MALUKU	294
MALUT	80
PABAR	108
PBD	97
PAPUA	161
PASEL	103
PAPTENG	288
PAPEG	331

NASIONAL

Sumber: BPS,, diolah